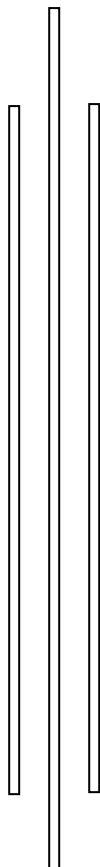




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
30 DESEMBER 2020

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	4
Laporan Realisasi Anggaran	5
Neraca	6
Laporan Operasional	7
Laporan Perubahan Ekuitas	8
Catatan Atas Laporan Keuangan	9
- BAB I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	13
2.1 Ekonomi Makro	
2.2 Kebijakan Keuangan	
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	14
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	14
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan	16
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	17
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan.....	17
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..	
4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah	20
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	21
5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
5.1.1 Belanja.....	37

5.1.2 Pembiayaan
5.1.3 Beban.....
5.1.7 Aset
5.1.8 Kewajiban
5.1.6 Ekuitas Dana
- BAB VIPENJELASAN TAMBAHAN 38
Lampiran – lampiran.....

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI.S.Kom,ME

NIP. 19700609 199703 1 002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.389.210.000,-, capaian ini suatu prestasi berturut-turut bagi Dinas Komunikasi dan Informatika karena sesuai potensi riil dan melebihi target, namun karena jumlah target penerimaan dinaikan Rp. 551.200.000,- oleh tim anggaran dan telah disepakati diturunkan sesuai potensi riil, maka capaian hanya 70,61%.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 6.655.643.042,- atau mencapai 97,49% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.723.533.662,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0,-, investasi jangka panjang sebesar Rp 0,-, aset tetap sebesar Rp. 7.723.533.662,-, dana cadangan Rp 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 0,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 10.981.033.675,23,-

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 480.520.000,-, Beban dari kegiatan Operasional Rp.7.726.835.749,- dan surplus/defisit sebesar Rp.7.246.315.749,-

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp. 4.702.577.983,23,-, Surplus/Defisit Rp. 0,- dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 10.981.033.675,23,-

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 Nomor 3/E);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 20/E);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 46/E);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 30/E);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 10 (sepuluh) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatanyang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;
3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. ProgramPengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
5. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa;
6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
8. Program Pengamanan Informasi;
9. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah;
10. Program Pola Hubungan Jaringan Persandian.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar Rp. 6.826.765.332,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Operasional	6.798.765.332,00
2.	Belanja Modal	28.000.000,00
	Surplus/(Defisit)	(6.275.565.332,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.826.765.332,00, terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.6.826.765.332,00 Realisasi capaian target kinerja keuangan secara rinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Belanja	6.826.765.332,00	6.655.643.042,00	97,49
	- <i>Belanja Operasional</i>	6.798.765.332,00	6.627.687.542,00	97,48
	- <i>Belanja Modal</i>	28.000.000,00	27.955.500,00	99,84
	Surplus/(Defisit)	(6.275.565.332,00)	(6.266.433.042,00)	99,85

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp.3.903.565.594,00 atau 98,19 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.72.108.447,00 atau 1,81 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Langsung	3.975.674.041,00	3.903.565.594,00	97,22
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	149.400.000,00	127.825.877,00	85,56
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88.320.000,00	88.320.000,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.279.445,00	48.279.445,00	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.772.600,00	45.772.600,00	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.807.500,00	12.260.000,00	95,73
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.665.000,00	8.640.000,00	99,71
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	4.440.000,00	98,67
9	Penyediaan makan dan minum	21.588.500,00	20.866.000,00	96,65
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28.283.348,00	28.158.348,00	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.150.000,00	54.785.000,00	96,97
12	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	8.493.700,00	8.403.700,00	98,94
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	142.770.000,00	136,045.100,00	92,11
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	31.887.000,00	31.862.000,00	99,92
15	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	3.418.250,00	3.418.250,00	100,00
16	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	00,00
17	Penyebarluasan Informasi dan Media Masa	150.137.000,00	147.275.000,00	98,09
18	Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	148.577.500,00	148.316.525,00	99,82
19	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	261.437.500,00	249.231.035,00	95,33
20	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluh Bagi Masyarakat	13.700.000,00	13.647.500,00	99,62
21	Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Wabah Virus Covid 19(Gugus tugas bidang Komunikasi Rwsiko Wabah) Penanganan Covid 19 dari DID Tambahan)	36.445.000,00	28.191.570,00	77,35
22	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	2.682.290.198,00	2.666.552.044,00	99,38
23	Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	16.05.000,00	15.347.700,00	95,54
24	Penyediaan Data Statistik Daerah	40.167.500,00	39.168.900,00	97,51
25	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	1.519.000,00	1.519.000,00	100,00
	Total	3.975.674.041,00	3.903.565594,00	98,19

3.2 Hambatan dan Kendala

- Secara umum tidak ada kendala yang berarti walau dimasa pandemic. Namun dari sisi rencana kerja awal ada capaian-capaian yang telah direncanakan tidak tercapai karena refocusing anggaran terkait realisasi anggaran tidak 100% adanya efisiensi anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedungan dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi;

penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

g. Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
a. Aset	7.723.533.662,00	7.703.578.161,00

Saldo Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.723.533.662,00dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(1)	Aset Lancar	0,00	8.000.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	7.723.533.662,00	7.695.578.161,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset		7.723.533.662,00	7.703.578.161,00

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
1) Aset Lancar	0,00	0,00

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatanper 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas Dinas Komunikasi dan Informatika Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
Jumlah		0,00	0,00

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(b) Piutang Retribusi

0,000,00

Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Retribusi	0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(c) Piutang lain-lain

0,000,00

Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi dan InfomatikaKabupaten Pesisir Selatanper tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(d) Persediaan

8.000.000,000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00
(2)	Perangko, materai, dan benda pos lainnya	0,00
(3)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00
(4)	Bahan Cetak	0,00
(5)		0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--------------------------	--------------------------

2) Investasi Jangka Panjang

0,00

0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2019 sebesar nihil.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Aset Tetap	7.723.533.662,00	7.695.578.161,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.695.578.162,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.7.723.53.662,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(a)	Tanah	48.152.000,00	48.152.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	5.520.932.373,00	5.492.976.873,00
(c)	Gedung dan Bangunan	170.650.000,00	170.650.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.958.276.789,00	1.958.276.789,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	25.522.500,00	25.552.500,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah Aset		7.723.533.662,00	7.695.578.161,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2020 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2019 (Rp. 0,00-Rp0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Tanah	48.152.000,00	48.152.000,00

Saldo Tanah Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 48.152.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2019

48.152.000,00

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi

+

Jumlah penambahan		0
Pengurangan Aset Tetap Tanah		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020		0,00

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 3 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020*

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	5.492.976.873,00	5.492.976.873,00

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. ,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2020*

Saldo Awal Per 1 Januari 2020 **5.492.976.873,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	27.955.500,00	
Hibah		
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi		+
Jumlah penambahan		5.520.932.373,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	(0,00)
Mutasi	0,00
Hibah	

Reklasifikasi	(000)	
Koreksi (ekstrakom)	(0,00)	+
Jumlah Pengurangan		0 +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020		5.520.932.373,00

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 8 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020*

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	170.650.000,00	170.650.000,00

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 170.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2020		170.650.000,00
Penambahan Gedung dan Bangunan		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	0,00	
Hibah		
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi		+
Jumlah penambahan		0,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan		
Penghapusan		
Mutasi	263.000.000,00	
Hibah		
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020		170.650.000,00

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020*

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.958.276.789,00	1.958.276.789,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.958.276.789,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2020

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	1.958.276.789,00
Hibah	
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	1.958.276.789,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(.....)
Mutasi	(0,00)
Hibah	(.....)
Reklasifikasi	(.....)
Koreksi	(.....) +
Jumlah Pengurangan	(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2020

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2020*

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	25.522.500,00	19.480.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 25.522.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2020

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2020

Rincian perolehan asset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020*

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 *nihil*

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(g) Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 (nihil).

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5) Aset Lainnya	0,00	0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset	0,00	0,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,00diperoleh dari jumlah total aset tahun 2020 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2019(Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00merupakan software dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 20200,00

Penambahan Aset Tak Berwujud

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal0,00

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	0,00

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(0) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020		0,00

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, terdiri dari *Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp0.00*, , dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2020	0,00
--------------------------------------	-------------

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	0

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)

Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(0) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020		0,00

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	0,00	
2	Alat kantor lainnya	0,00	
3	Mebelair	0,00	
4	Alat rumah tangga lainnya	0,00	
5	Personal Komputer	0,00	
6	Peralatan Komputer Mainframe	0,00	
7	Peralatan Personal Komputer	0,00	
8	Peralatan Studio Visual	0,00	
9	Peralatan Studio video dan film	0,00	
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2020 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	Alat rumah tangga lainnya	0	0,00
Jumlah		0	0,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo KewajibanDinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatanper 31 Desember 2020adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajibanDinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir Selatan. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang beban	0,00
(b)	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00
(c)		
Jumlah Hutang		0,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020*nihil*Rp.0,00.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Ekuitas Dana	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp 0,00

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatandalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pesisir SelatanAnggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran2020 serta realisasi Tahun Anggaran2020, adalah *nihil*

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2020(Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
(1)	Pendapatan Asli Daerah	389.210.000,00	389.210.000,00	480.520.000,00
	- Pajak kendaraan bermotor	0,00	0,00	1.200.000,00
	- Retribusi Menara	388.010.000,00	388.010.000,00	479.320.000,00
	-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
(2)	Lain-lain Pendapatan yang	0,00	0,00	

	Sah			
Jumlah		389.210.000,00	389.210.000,00	480.520.000,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
b. Belanja	,00	7.798.855.350,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2020Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Operasi	6.627.687.542,00	11.533.144.349,00

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatanmeliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2020Rp**6.627.687.542,00**dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020(Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
(a)	Belanja Pegawai	2.851.091.291,00	2.752.077.448,00	2.024.447.289,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	3.947.674.041,00	3.875.610.094,00	9.508.697.060,00
Jumlah		6.798.765.332,00	6.627.687.542,00	11.533.144.349,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
2) Belanja Modal	27.995.500,00	3.806.308.600,00

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2020 Rp. **27.955.500,00**dengan rinciansebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor lainnya	28.000.000,00	27.955.500,00	75.333.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	201.421.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	952.758.450,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	74.300.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	9.500.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	196.328.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	29.915.000,00
	Jumlah 2	0,00	0,00	1.539.555.450,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal PengadaanBangunan Gudang	0,00	0,00	213.625.000,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	213.625.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	28.000.000,00	27.955.500,00	1.753.180.450,00

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal Rp. 27.955.500,00 berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Pengadaan Alat kantor lainnya Rp27.955.500,00 belanja gedung dan Bangunan Rp 0,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00*);
-

3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

	31 Desember 2020
	(Rp)
a. Pendapatan LO	389.210.000,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan sebagai berikut, adalah *nihil*sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	2020 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah	389.210.000,00
	- Pajak	
	- Retribusi	389.210.000,00
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
Jumlah		389.210.000,00

	31 Desember 2020
	(Rp)
b. Beban	2.752.077.448,00

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2020,sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp 2.752.077.448,-

Sedangkan Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel		
No.	Rincian Beban Pegawai	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.927.441.563,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	824.635.875,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH dan WKDH - LO	0,00
4.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	0,00
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00
6.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00
7.	Uang Lembur – LO	0,00
Jumlah Total		2.752.077.448,00

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.875.610.094,00

Sedangkan Beban Barang dan Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel		
No.	Rincian Beban Barang dan Jasa	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Persediaan Bahan Habis Pakai	74.568.615,00
2.	Beban Persediaan Bahan/Material	2.700.000,00
3.	Beban Makanan dan Minuman	46.009.428,00
4.	Beban Jasa Kantor	2.279.053.913,00
5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	135.309.050,00
6.	Beban Cetak dan Penggandaan	63.849.000,00
7.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00
8.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00
9.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00
10.	Beban Perjalanan Dinas	170.644.246,00
11.	Beban Pemeliharaan	260.951.842,00
12.	Beban Pihak Ketiga	262.374.000,00
13.	Beban Uang untuk diberika kepada Pihak Ketiga/masyarakat	26.000.000,00
14.	Beban Honorarium PNS – LO	144.650.000,00
15.	Beban Honorarium Non PNS- LO	407.000.000,00
Jumlah Total		3.875.610.094,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

3) Beban Hibah

BebanHibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2020sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Hibah menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Hibah	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00
4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00
5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00
6.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00
Jumlah Total		0,00

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00
Jumlah Total		0,00

5) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum tahun anggaran 2020, sedangkan belanja modal tahun 2020 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2020.

Sedangkan Beban Penyusutan menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
Jumlah Total		0,00

6) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
Jumlah Total		0,00

7) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Lain-lain menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Realisasi (Tahun 2020)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00
2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00
3.	Beban Lain-lain	
Jumlah Total		0,00

- c. **Surplus/Defisit dari Operasi**
 Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2020sampai dengan 31 Desember 2020sebesar Rp (6.238.477.542,00)

- d. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**
 Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp6.238.477.542,00

- e. **Surplus/Defisit - LO**
 Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020surplus sebesar Rp(6.238.477.542,00)

4. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan.
- a. Saldo awal ekuitas tahun 2020 sebesar Rp4.702.577.983,23
 - b. Surplus/defisit – LO sebesar Rp(6.278.455.692,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2020
 - c. Koreksi Ekuitas sebesar Rp0,00 dengan rincian : pembelian/reklasifikasi ke aset pompa (ekstrakomptabel)
 - d. Ekiutas akhir sebesar Rp (10.981.033.675,23)

BAB VI

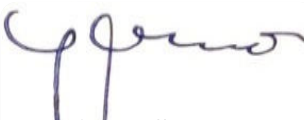
PENJELASAN TAMBAHAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada penyusunan Laporan Keuangan 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2020 (setelah Audit).
2. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020.
3. Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2020.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom.ME
NIP. 19700609 199703 1 002